Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 119-122
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23682812

Pengoptimalan Potensi Desa Pasir Kelampaian Dalam Melayani Permasalahan Masyarakat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu

Optimizing the Potential of Pasir Kelampaian Village in Addressing Community Issues in Sungai Lala District, Indragiri Hulu Regency

Juliana Dinata[1]
[1]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Riau
Email: julianadinata@student.uir.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas pengoptimalan potensi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam melayani permasalahan masyarakat berdasarkan pengalaman kegiatan magang di kantor desa. Penulisan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan observasi langsung dan keterlibatan dalam kegiatan administrasi, pengarsipan, pendataan masyarakat, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan, kepemudaan, serta koordinasi dengan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah desa tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga pendataan keluarga miskin ekstrem dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pendampingan penyaluran bantuan pangan, kegiatan Posyandu dan Cek Kesehatan Gratis, kegiatan PKK dan Karang Taruna, serta diskusi dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerja sama perangkat desa dan masyarakat, ketersediaan sarana serta data, dan koordinasi antarpihak. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu, kelengkapan data, perbedaan kebutuhan masyarakat, dan tantangan komunikasi serta koordinasi. Optimalisasi potensi desa memerlukan pelayanan yang tertib, data yang akurat, partisipasi masyarakat, dan tindak lanjut terhadap aspirasi warga.
Kata kunci: *potensi desa, pelayanan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan Masyarakat*

ABSTRACT

This article examines efforts to optimize the potential of Pasir Kelampaian Village, Sungai Lala District, Indragiri Hulu Regency, in addressing community needs based on internship experiences at the village office. The article adopts a descriptive approach based on direct observation and participation in administrative activities, archiving, community data collection, social services, health programs, community empowerment, youth activities, and coordination with residents. The findings indicate that village government services extend beyond administrative matters to include data collection on extremely poor households and beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH), assistance in distributing food aid, Integrated Health Post (Posyandu) activities and Free Health Checkups, Family Welfare Movement (PKK) programs and Youth Organization (Karang Taruna) activities, as well as discussions with hamlet heads and community leaders. The implementation of these activities is supported by cooperation between village officials and the community, the availability of facilities and data, and coordination among relevant stakeholders. The identified challenges include time constraints, incomplete data, varying community needs, and communication and coordination difficulties. Optimizing village potential requires well-organized public services, accurate data, community participation, and appropriate follow-up on residents' aspirations.
Keywords: *village potential, community services, village governance, community empowerment.*

Article Info
Received date: 22 September 2026 Revised date: 30 September 2026 Accepted date: 07 October 2026

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan setempat. Pemerintahan desa tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mendukung pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pelayanan publik di tingkat desa mencakup pelayanan administrasi dan kependudukan, penyampaian informasi, pendataan, serta kegiatan pemberdayaan. Pelayanan yang baik membutuhkan prosedur yang jelas, ketelitian aparatur, komunikasi, dan pengelolaan dokumen yang tertib. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat.

Desa Pasir Kelampaian berada di Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, jumlah penduduk desa pada 2023 tercatat sebanyak 813 jiwa, terdiri atas 426 laki-laki dan 387 perempuan. Desa ini memiliki satu Posyandu dengan tujuh kader, 115 pasangan usia subur, 59 peserta KB aktif, serta lima perusahaan industri kecil. Data tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pelayanan pemerintahan sekaligus potensi sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan.

Pengalaman magang di Kantor Desa Pasir Kelampaian memberikan kesempatan untuk mengamati pelayanan administrasi dan terlibat dalam pengarsipan, pendataan keluarga miskin ekstrem dan penerima PKH, pendampingan penyaluran bantuan pangan, kegiatan Posyandu, PKK, Karang Taruna, Cek Kesehatan Gratis, serta diskusi dengan masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut, artikel ini bertujuan menggambarkan bentuk pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya pengoptimalan potensi desa dalam melayani permasalahan masyarakat.

METODE

Artikel ini disusun dengan pendekatan deskriptif berdasarkan pengalaman dan observasi selama kegiatan magang di Kantor Desa Pasir Kelampaian. Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses pelayanan administrasi, pengarsipan dan pendataan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial, kesehatan, pemberdayaan, kepemudaan, dan diskusi bersama perangkat desa maupun masyarakat. Pembahasan disusun dengan mengelompokkan pengalaman ke dalam aspek pelayanan administrasi, pendataan masyarakat, pemberdayaan, penanganan permasalahan, dan partisipasi serta koordinasi masyarakat. Artikel ini tidak menyajikan pengukuran statistik efektivitas karena dokumen sumber berisi catatan kegiatan magang dan observasi deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Pasir Kelampaian

Desa Pasir Kelampaian merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Sungai Lala. Data tahun 2023 mencatat jumlah penduduk sebanyak 813 jiwa atau sekitar 4,55 persen dari penduduk Kecamatan Sungai Lala. Pada aspek pemerintahan, desa memiliki tiga orang pada sekretariat desa, tiga pelaksana teknis, 18 pelaksana kewilayahan, dan delapan pegawai desa lainnya. Data tersebut menunjukkan pentingnya pembagian tugas dan koordinasi antaraparatur dalam menjalankan pelayanan.

Potensi pelayanan sosial desa terlihat dari keberadaan satu Posyandu dengan tujuh kader, kegiatan keluarga berencana, serta kegiatan ekonomi yang mencakup lima perusahaan industri kecil. Selain itu, kegiatan BUMDes yang dibahas dalam penelitian Windartini et al. (2022) menunjukkan pentingnya kerja sama pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi desa.

2. Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Data

Pelayanan administrasi yang diamati berlangsung melalui tahapan penyampaian keperluan oleh masyarakat, pemeriksaan persyaratan, pencatatan atau penginputan data, pemrosesan, pemeriksaan hasil, dan penyerahan dokumen. Apabila persyaratan belum lengkap, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Alur ini menekankan pentingnya kejelasan informasi, ketepatan data, ketertiban administrasi, dan komunikasi antara petugas dengan masyarakat.

Pengarsipan dilakukan melalui pengelompokan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen agar mudah ditemukan kembali. Selain itu, kegiatan magang mencakup pendataan keluarga miskin ekstrem

dan penerima PKH. Ketepatan pendataan menjadi hal penting karena informasi tersebut mendukung pelayanan sosial dan penyaluran bantuan. Pemeriksaan kembali data diperlukan untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan memastikan kesesuaian dengan informasi yang tersedia.

3. Pelayanan Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan

Keterlibatan dalam pendampingan penyaluran bantuan pangan berupa beras memperlihatkan pentingnya koordinasi dan ketepatan data penerima. Pada bidang kesehatan, kegiatan meliputi membantu kader Posyandu menyusun program serta membantu pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis. Kegiatan tersebut menjadi contoh keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelayanan dasar.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan PKK, termasuk pembuatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), serta kegiatan bersama Karang Taruna dan pemuda. Penulis turut mengikuti rapat pemuda mengenai kegiatan olahraga dan membantu persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa potensi desa dapat dikembangkan melalui partisipasi kelompok masyarakat, kerja sama, dan pemanfaatan kemampuan serta sumber daya setempat.

4. Komunikasi dan Penanganan Permasalahan Masyarakat

Diskusi bersama masyarakat, kepala dusun, dan tokoh masyarakat menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan warga. Proses ini membantu pemerintah desa mengenali persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat. Identifikasi masalah perlu diikuti komunikasi yang terbuka, koordinasi dengan pihak terkait, dan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan pemerintah desa.

Berdasarkan kegiatan magang, pengoptimalan potensi desa dalam melayani permasalahan masyarakat dapat dilihat melalui lima aspek: pelayanan administrasi yang jelas dan tertib; pendataan yang lengkap dan akurat; pemberdayaan yang melibatkan masyarakat; komunikasi dan koordinasi untuk mengenali permasalahan; serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Aspek-aspek tersebut saling mendukung dan tidak dapat dijalankan secara terpisah.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung kegiatan meliputi kerja sama antara mahasiswa, perangkat desa, kader, pemuda, dan masyarakat; keterbukaan masyarakat; tersedianya sarana dan prasarana kantor; ketersediaan dokumen dan data; serta koordinasi antar pihak. Dukungan tersebut membantu pelaksanaan kegiatan administrasi, pendataan, pelayanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan.

Adapun hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu sehingga tidak semua kegiatan dapat diamati secara mendalam dan berkelanjutan; kelengkapan data masyarakat dan bantuan sosial yang memerlukan pemeriksaan ulang; perbedaan kondisi dan kebutuhan warga; serta tantangan komunikasi dan koordinasi ketika kegiatan melibatkan banyak pihak. Hambatan ini menunjukkan perlunya pengelolaan data yang lebih tertib, komunikasi yang konsisten, dan perencanaan kegiatan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Pengoptimalan potensi Desa Pasir Kelampaian dalam melayani permasalahan masyarakat berlangsung melalui kegiatan administrasi, pengarsipan, pendataan masyarakat, pendampingan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan melalui PKK dan Karang Taruna, serta komunikasi dengan masyarakat, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Pengalaman magang menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan desa mencakup aspek administratif dan sosial yang saling berkaitan.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerja sama perangkat desa dan masyarakat, ketersediaan sarana dan data, serta koordinasi antarpihak. Sementara itu, keterbatasan waktu, kelengkapan data, perbedaan kebutuhan masyarakat, dan tantangan komunikasi menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah desa perlu menjaga ketertiban administrasi,

memeriksa keakuratan data, memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.

SARAN

Pemerintah Desa Pasir Kelampaian disarankan untuk terus meningkatkan ketertiban administrasi dan pengelolaan data, memperkuat koordinasi antarperangkat dan kelompok masyarakat, serta menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Masyarakat diharapkan aktif mengikuti kegiatan desa dan menyampaikan aspirasi. Mahasiswa magang berikutnya diharapkan dapat melakukan observasi lebih berkelanjutan dan mendokumentasikan kegiatan secara sistematis.

REFERENSI

Ahfan, R., Asrori, & Sipahutar, H. (2015). Pemberdayaan masyarakat pada program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (konteks lahirnya UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Bina Praja, 7*(1), 89–100. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.89-99

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. (2024). *Kecamatan Sungai Lala dalam angka 2024*.

Marsono. (2017). Membangun model pelayanan publik desa: Mendekatkan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Borneo Administrator, 13*(1), 1–20. https://doi.org/10.24258/jba.v13i1.272

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Sofyan, M. M., Yudiana, Y., Arifin, N., & Azhar, F. (2021). Peran aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal RASI, 3*(1). https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.119

Windartini, S., & Karya Putri, M. (2022). Menciptakan womenpreneur mindset (pola pikir wirausahawan wanita) Desa Tambak. *VALUES: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4*(2), 28–34. https://journal.itbind.ac.id/index.php/pkm/article/view/138